

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Feminisme Liberal Dan Pendasaran Filosofisnya

Feminisme liberal muncul di Eropa pada abad ke-18, seiring dengan kemajuan gagasan baru dari periode pencerahan. Pandangan dasar dari gerakan ini berasal dari pemikiran John Locke mengenai hak-hak alami, yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak asasi, termasuk hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk mengejar kebahagiaan.

Feminisme liberal memiliki pemahaman yang berlandaskan prinsip-prinsip liberalisme yang meyakini bahwa tujuan utama dalam kehidupan sosial adalah kebebasan individu. Kebebasan individu dianggap sebagai keadaan yang sempurna karena dengan kebebasan, seseorang bisa memilih untuk memenuhi ekspresinya terhadap hal-hal yang diinginkannya. Oleh karena itu, dasar dari feminisme liberal adalah menuntut kesempatan dan hak yang setara bagi setiap orang, termasuk perempuan, berdasarkan kesetaraan kapasitasnya sebagai makhluk rasional.¹⁰

¹⁰ Alfian Rokhmansyah, S.S., M, Hum, *pengantar gender dan feminisme*, (Yogyakarta Garudhawaca, 2016), 50-51

Feminisme liberal berpendapat bahwa penindasan terhadap perempuan disebabkan oleh batasan hukum dan norma sosial, yang membuat perempuan merasa terhalang untuk berpartisipasi dalam ruang publik. Menurut perspektif feminisme liberal, manusia memiliki kemampuan yang memisahkan mereka dari makhluk lainnya. Ini terlihat pada dua aspek rasionalitas, yaitu moralitas (kemampuan untuk mengambil keputusan secara mandiri) dan prudensialitas (pemenuhan keputusan itu sendiri). Dengan adanya pemahaman itu, baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak dan peluang yang setara untuk mengembangkan diri mereka. Permasalahan yang ada berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang memihak gender tertentu. Oleh karena itu, pada abad ke-18 sering muncul tuntutan agar perempuan mendapatkan akses pendidikan yang setara, di abad ke-19 banyak upaya dilakukan untuk memperjuangkan hak sipil dan ekonomi bagi perempuan, dan di abad ke-20, berbagai organisasi perempuan mulai didirikan untuk melawan diskriminasi seksual di bidang politik, sosial, ekonomi, dan pribadi.¹¹

Feminisme liberal meyakini bahwa sistem patriarki dapat diubah dengan mengubah pandangan masing-masing orang, khususnya pandangan wanita terhadap pria. Wanita perlu menyadari dan

¹¹ Siti Dana Panti Retnani, *FFEMINISME DALAM PERKEMBANGAN ALIRAN PEMIKIRAN DAN HUKUM DI INDONESIA*, *Alethea: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2017, 100

memperjuangkan hak-hak mereka. Tuntutan ini akan membuka mata kaum pria, dan ketika kesadaran ini sudah menyebar, akan muncul kesadaran baru yang menciptakan sebuah masyarakat baru di mana pria dan wanita saling bekerja sama dengan prinsip kesetaraan.¹²

Untuk menguraikan dasar filosofis dalam feminisme liberal sebagai respon terhadap hal ini penulis menggunakan perspektif teori Mary Wollstonecraft yang merupakan seorang filsuf, penulis dan sekaligus adalah seorang yang memelopori feminisme di Inggris pada sekitar abad ke-18, Mary Wollstonecraft mulai menerbitkan berbagai kritikan tentang kesetaraan gender yang bersifat radikal. Salah satu karya Mary Wollstonecraft adalah *A Vindication of the Woman* di terbitkan pada tahun 1792. Pemikirannya termasuk dalam kategori feminisme liberal, yang didasari oleh prinsip-prinsip liberalisme yang menekankan bahwa wanita dan pria diciptakan setara, untuk mendapatkan peluang dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Karya ini menjadi dasar yang signifikan untuk memperjuangkan kesetaraan dan hak dari perempuan. Dia memberikan kritik terhadap sistem sosial yang mendiskreditkan perempuan dan juga melakukan perjuangan terhadap akses yang lebih

¹² Wafa Suci Ningrum, *FENOMENA KEBERHASILAN FEMINISME (Studi Gender tentang Feminisme Liberal dan Feminisme Radikal)*, *FAMILIA: JURNAL HUKUM KELUARGA* VOL. 5 NO. 1 TAHUN 2024, 31

besar untuk perempuan dalam pendidikan dan partisipasi ranah publik.¹³

Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa feminisme liberal dan dasar filosofisnya memandang wanita dan pria mempunyai hak dan peluang yang sama. Ketidaksetaraan yang dialami wanita bukan karena kodrat tetapi karena budaya atau aturan masyarakat yang membatasi perempuan.

1. Feminisme Liberal Dan Pemikirannya Yang Mendasarinya

Dalam pandangan feminisme liberal mengenai wanita pada dasarnya mempunyai potensi berpikir dan moral yang sama dengan pria, sehingga segala bentuk pembatasan terhadap partisipasi perempuan merupakan bentuk ketidakadilan yang melanggar prinsip kesetaraan manusia. Dalam konteks ini, feminisme menolak pandangan tradisional yang menempatkan perempuan pada ranah domestik semata dan menuntut adanya reformasi struktural agar perempuan dapat mengakses pendidikan, pekerjaan, dan posisi politik yang setara. Oleh karena itu fokus feminisme liberal bukan pada konfrontasi diantara pria wanita, melainkan dalam perubahan struktur diskriminatif melalui

¹³ Yahdiani Hanani, Radea Yuli A. Hambali, *Fashion Style Milenial Perspektif Feminisme Mary Wollstonecraft*, 19 (2023), 804

pendidikan, advokasi hukum, dan kebijakan afirmatif yang mendorong partisipasi perempuan di ruang publik.

Landasan filosofis gerakan ini berakar dari pemikiran *liberalisme klasik* seperti John Locke, John Stuart Mill, dan Mary Wollstonecraft yang menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan kesetaraan hukum. Dalam kerangka ini, feminisme liberal berupaya membongkar struktur sosial dan kebijakan yang membatasi perempuan melalui pendekatan reformasi yakni dengan memperjuangkan kebebasan dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik serta menuntut perubahan radikal terhadap sistem sosial. Nilai-nilai sosial dapat dijelaskan melalui 4 konsep pokok sebagai berikut.¹⁴

2. Konsep Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah istilah yang biasanya digunakan dalam studi gender untuk menunjukkan pembagian tugas dan hak yang seimbang serta adil. Kesetaraan gender adalah situasi di mana laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama, seimbang, dan setara dalam memperoleh hak-hak sebagai manusia di semua bidang kehidupan. Kesetaraan gender adalah konsep yang memastikan bahwa stereotip tidak lagi membatasi peran laki-laki dan perempuan dalam mengembangkan potensi masing-masing. Adapun indikator dalam

¹⁴ Ardhia Rachma Cahyani, *Feminisme Liberal Dalam Politik Indonesia: Gerakan Kebebasan dan Kesetaraan Gender*, *Journal of Feminism and Gender Studies*, 2025, 2-3

kesetaraan gender yang meliputi adanya akses atau peluang atas kesempatan untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Namun kesenjangan gender masih terus dihadapi oleh perempuan di hampir semua sudut dunia, baik yang terbuka maupun yang pribadi, mulai dari urusan dalam rumah tangga hingga masalah reproduksi. Kesenjangan yang masih terjadi antara peran perempuan dan laki-laki terlihat di berbagai aspek kehidupan.¹⁵

Dalam pandangan John Locke berpendapat bahwa setiap orang diberikan oleh Tuhan hak-hak alamiah yang mencakup hidup, kebebasan, dan kepemilikan, dan hak-hak ini tidak boleh direbut atau dicabut oleh siapapun. Ide dan konsep hak-hak manusia seperti ini muncul dan berkembang di Eropa Barat yang memiliki pemikiran cemerlang pada masa itu, khususnya sepanjang akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 politik. Pada zaman itu ketidakadilan tidak berpihak kepada perempuan, dimana kebebasan mereka masih dibatasi oleh aturan tradisi dan juga diskriminasi yang memperbudak perempuan.¹⁶

Dalam pandangan Mary Wollstonecraft untuk menyampaikan pendapatnya dalam suasana pendidikan dan kesetaraan sosial. Mary

¹⁵ Dhea Januastasya Audina, *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 4, 2022, 150-151

¹⁶ Predy Sanjaya, *Implementasi Pasal 71 UUD Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam Perlindungan Korban Penganiayaan di Kantwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah*, 2024, 16

Wollstonecraft mengatakan bahwa ada perbedaan sosial antara laki-laki dan perempuan. Wollstonecraft, laki-laki dan perempuan adalah individu yang memiliki pemikiran yang sama, selama mereka diberi pendidikan yang sama. Ketidaksetaraan itu yang membuat terjadinya perbedaan dan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal pendidikan dan pengalaman, kesenjangan menjadi hambatan atau penghalang dalam membentuk masyarakat yang modern. Menurutnya, tanpa keadilan sosial, tidak akan ada kehidupan sosial yang sehat, sehingga Mary Wollstonecraft meminta agar terjadi perubahan dan pembaharuan terhadap pandangan konservatif yang ada di masyarakat. Tuntutan tersebut mencakup hak dan kemerdekaan perempuan, yang dalam hal ini diatur oleh sistem gender yang berkuasa di masyarakat. Dia juga memberi contoh kepada masyarakat yang selalu menganggap laki-laki sebagai orang yang berpikir masuk akal, sedangkan perempuan dianggap sebagai orang yang mudah merasa perasaan.¹⁷

Pandangan ini menyebabkan ketidaksetaraan gender yang terus berlangsung, dan jika tidak ada pengakuan terhadap kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari, perempuan tetap akan menghadapi diskriminasi dan pembatasan dalam menjalankan peran mereka di masyarakat. Pada abad ke- 18 Mary Wollstonecraft, salah satu tokoh

¹⁷ Ilaa Thurfah Dhiyaa, "Feminisme dan Kebebasan Perempuan Indonesia dalam Filosofi," *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4 (3), 2021, 213

feminisme, yang menjadi faktor untuk melatarbelakangi ide feminisme ini muncul diantaranya adalah pada masa itu perempuan tidak boleh menyampaikan pendapat dan aspirasinya.

Oleh sebab itu lewat buah pikirnya yang berjudul *A Vindication of the Rights of Woman* terbit di tahun 1792. Menjadi tujuan utama memperjuangkan dan megembangkan potensi perempuan yang sama dengan laki-laki untuk mencapai kesetaraan gender.¹⁸ Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Mary Wollstonecraft dalam konteks pemikiran John Stuart Mill memiliki pandangan yang sama berdasarkan tulisanya yang berjudul *The Subjection of Woman* memiliki pandangan bahwa usaha untuk memiliki kesamaan hak antara perempuan dan laki-laki telah tercapai. Perempuan dan laki-laki harus diberikan hak untuk mengejar apa yang diinginkannya. Hal itu dengan catatan bahwa mereka tidak saling menjatuhkan keinginan masing-masing.¹⁹

3. Kesetaraan Pendidikan

Secara dasar, laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan dalam hal posisi, hak, kewajiban, dan kesempatan, baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, maupun dalam kehidupan keluarga, serta dalam segala bidang kegiatan pembangunan.

Pendidikan adalah hak yang paling penting bagi setiap manusia. Oleh

¹⁸ Yahdiani Hanani, Radea Yuli A. Hambali, *Fashion Style Milenial Perspektif Feminisme Mary Wollstonecraft*, 19 (2023), 804

¹⁹ Dr. Iklasiah Dalimoenthe, M.Si, 49

karena itu, setiap orang yang menjadi warga negara berhak mendapatkan pendidikan agar bisa hidup lebih baik di masa depan. Dalam kesetaraan gender, wanita memiliki hak yang sama dan posisi yang setara dengan pria, terutama dalam hal pendidikan, seperti yang diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.” Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal memperoleh akses ke pendidikan.²⁰

Di Indonesia, perempuan masih menghadapi tantangan dalam memperoleh keadilan dan kesetaraan di bidang pendidikan. Ada banyak hal yang mempengaruhi pertumbuhan minat belajar pendidikan. Beberapa orang berpikir bahwa perempuan hanya akan tampil di bidang rumah tangga untuk keluarganya di masa depan. Perempuan hanya makhluk yang dipakai untuk memenuhi kepentingan-kepentingan laki-laki. Hal ini disebut dengan istilah subordinasi. Oleh karena itu, wanita lebih baik tidak masuk ke bangku sekolah, karena kelak mereka juga akan kembali ke dapur.

Ada dua perempuan yang berperan penting dalam mendorong kesetaraan pendidikan yaitu Dewi Sartika dan Rahmah El-Yunusiyah,

²⁰ Rahmah , Istiana Heriani , Munajah, *KESETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN TERHADAP PEREMPUAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA*, 2022, 3

keduanya memiliki dampak besar terhadap kemajuan pendidikan perempuan. Dewi Sartika adalah seorang priyayi yang dianggap sebagai anak buatan. Sebagai anak priyayi dengan pikiran yang visioner, Dewi Sartika melihat bahwa perempuan pada masa itu terlalu bergantung pada laki-laki. Karena itu, ia memutuskan untuk mendirikan sebuah sekolah khusus untuk perempuan yang dinamai Sekolah Istri. Upaya ini bertujuan untuk mensejahterakan perempuan. Rahmah El-Yunusiyyah adalah seorang perempuan yang hidup dalam keluarga yang sangat taat kepada agama. Rahmah memiliki semangat belajar yang sangat tinggi, dia percaya bahwa perempuan harus cerdas, selain itu dia juga berpendapat bahwa perempuan harus menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Rahmah adalah seorang yang sangat luar biasa, dia aktif dalam bidang pendidikan dan politik. Kiprahnya dikenal masyarakat ketika dia mendirikan sekolah khusus untuk perempuan yang bernama Diniyyah School Puteri. Rahmah dikenal sebagai seorang guru perempuan yang sangat tangguh. Kedua tokoh ini merupakan contoh nyata dari penerapan feminisme liberal melalui pendidikan yang nyata dan konkret.²¹

Berdasarkan pembahasan ini, kedua tokoh ini tujuan yang sama untuk memberikan pendidikan yang layak bagi perempuan agar

²¹ Pijar Maulid, *Analisis Feminisme Liberal terhadap Konsep Pendidikan Perempuan (Studi Komparatif antara Pemikiran Dewi Sartika dan Rahmah ElYunusiyyah)*, *Jurnal Riset Agama*, Volume 2, No 2, 2022, 604-605

mereka tidak bergantung kepada pekerjaan domestik dan juga tidak bergantung kepada laki-laki. Pendidikan yang mereka berikan lewat sekolah yang mereka dirikan agar menciptakan perempuan yang mandiri dan tangguh.

Gerakan feminisme yang berkembang sekitar abad ke-18. Feminisme mengerti bahwa penindasan terhadap perempuan berdasarkan ras, jenis kelamin, kelas, dan orientasi seksual harus diubah. Feminisme menunjukkan pentingnya nilai-nilai perempuan serta pengalaman yang mereka bagi bersama dan usaha yang mereka lakukan. Feminisme menganggap bahwa setiap orang, baik perempuan maupun laki-laki, dari lahirnya sudah memiliki hak yang sama. Oleh karena itu, mereka harus memiliki hak yang sama dalam segala hal, termasuk pendidikan. Namun pada kenyataannya, dunia pendidikan masih tidak seimbang, laki-laki dan perempuan masih diberi perbedaan dalam hal pendidikan. Jenis kelamin menentukan hak atas dasar pendidikan. Perempuan sering kali diabaikan dalam bidang pengetahuan luar dan ilmu pengetahuan. Mereka lebih ditekankan dalam pengetahuan domestik. Laki-laki diberi kebebasan untuk mencari ilmu pengetahuan. Mereka diberi kuasa atas kedudukan mereka. Berbagai konteks masyarakat patriarki di Eropa pada awal abad ke-18- dimana pada masa itu masyarakat cenderung bersifat patriarki

menganggap bahwa perempuan memiliki sifat yang tenang, mudah goyah, dan tidak mampu berpikir sendiri. Persoalan ini yang menjadi dasar pada struktur patriarki yang masih sering memperkuat ketidaksetaraan antara bagi perempuan, baik dari pendidikan, ekonomi, dan sosial maupun politik yang mengintimidasi, mengeksplorasi wanita, dan meyakini bahwa laki-laki selalu berada dalam posisi yang dominan dan perempuan berada dalam posisi subordinat. Mary Wollstonecraft salah satu tokoh feminisme yang tumbuh pada lingkungan keluarga kelas menengah yang memegang sistem patriarki di Inggris. Ayahnya dikenal sebagai figur yang keras, dan sering kali melakukan kekerasan pada ibunya sehingga masa kecil Mary Wollstonecraft diwarnai oleh tekanan serta pengalaman yang tidak menyenangkan. Kondisi tersebut turut membentuk karakter Mary Wollstonecraft menjadi pribadi yang lebih mandiri sejak usia dini.²²

Mary Wollstonecraft tidak memperoleh pendidikan secara formal akibat dari keluarganya yang tidak harmonis, ayahnya lebih mengutamakan saudara laki-lakinya untuk mendapatkan pendidikan yang formal. Ayahnya beranggapan bahwa perempuan tidak perlu bersekolah dan menimba ilmu yang tinggi, karena hal yang demikian merupakan tugas laki-laki dan bukan tugas seorang perempuan.

²² Irda Tri Fauziah; Sri Wulan Dewi; Raisa Aulia Adhani; Fadiya Mahadika; Mohammad Alvi Pratama, *Hukum Kritis Dan Feminisme: Analisis Gender Dalam Struktur Hukum Dari Perspektif Teori Mary Wollstonecraft*, *Jurnal Filsafat Terapan* 2:1, 2025, 5-7

Perempuan hanya boleh diam di rumah melakukan pekerjaan rumah dan melayani seorang laki-laki. hal itu membuat Mary Wollstonecraft melihat ketidakadilan dalam keluarganya karena ia melihat kakak laki-lakinya mendapatkan kesempatan untuk bersekolah sedangkan tidak denganya.²³

Mary Wollstonecraft mulai bekerja sebagai pengasuh dan pekerja ia mulai mendirikan sekolah untuk perempuan di Newington Green bersama dengan adik perempuan dan temanya yang bernama Fany Blood. Pada awalnya sekolah yang didirikan mendapatkan respon yang buruk dari masyarakat, namun tekadnya tidak padam ia tetap melanjutkan pendiriannya dan dibantu oleh seorang laki-laki yang mendukung tentang revolusi perempuan yang bernama Thomas Jefferson. Mary Wollstonecraft memberikan pendidikan rasional bagi perempuan yang bertentangan dengan norma pada saat itu, dimana perempuan hanya diajarkan keterampilan domestik ringan, seperti pekerjaan rumah, dan melayani suami. Mary Wollstonecraft ingin membuktikan bahwa perempuan akan terbebas dari situasi subordinasi dan mereka bisa belajar dan mempunyai pendidikan yang sejajar dengan para laki-laki. Mary Wollstonecraft mulai menerbitkan berbagai kritikan tentang kesetaraan gender yang bersifat radikal.

²³ Sumiyati, Siti Qomariatul Munawaroh, Emilia Nurwati R, Hera Hapsari Kusuma, Khoiriyah, *Komperatif Pemikiran Rahmah El-Yunussiyah Wollstonecraft Tentang Pendidikan Perempuan*. *Jurnal Dinamika Pendidikan* 2:2. 2026. 596-600

Sejak itulah Mary Wollstonecraft mulai menulis buku berbasis radikal tentang karya Mary Wollstonecraft yang berjudul *A Vindication of the Rights of Woman* adalah hal yang fenomenal dan menjadi pendiri feminisme, maka dari itu ia dianggap sebagai ibu feminis di Inggris.²⁴

Mary Wollstonecraft, berpendapat Untuk bisa memiliki kekuatan, seorang perempuan perlu jujur, cerdas, dan mandiri. Mary Wollstonecraft juga mengatakan bahwa kedua pihak adalah pribadi melalui pendapat yang setara kalau diberi kesempatan sekolah yang sama. Ia juga menekankan bahwa masyarakat memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan yang layak kepada perempuan, seperti selama ini pendidikan tersebut diberikan kepada laki-laki. Hal itu mengingat bahwa setiap individu setara dalam memperoleh hak pendidikan, mendapatkan peluang yang seimbang, dalam rangka mengasah kemampuan bernalar serta etika. Mary Wollstonecraft juga mendukung perempuan dalam mengambil keputusan, dan hal ini menurutnya didapatkan melalui pendidikan. Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan instrumen fundamental dalam mewujudkan pengakuan terhadap hak dan martabat perempuan secara merata. Dalam karya-karyanya, Wollstonecraft mendorong adanya reformasi dalam paradigma pendidikan yang tidak sekedar memprioritaskan

²⁴ Dieva Oktoviyari Putri dll, *Essai Subordinat Perempuan Dalam Teori Feminisme Karya Mary Wollstonecraft*, 2024, 34-45

terhadap teknis semata, namun juga harus memikirkan dimensi sosial dan moral yang menjadi landasan penting untuk mencapai kesetaraan gender.²⁵

4. Kesetaraan Hak Dan Kebebasan

Kebebasan individu menegaskan hak perempuan untuk menentukan pilihan hidupnya tanpa tekanan sosial, politik, atau budaya patriarki. Bagi feminisme liberal, kebebasan individu berarti pengakuan atas otonomi perempuan sebagai agen moral dan politik yang mampu mengambil keputusan sendiri. Sejalan dengan pandangan Mary Wollstonecraft (1792) dalam *A Vindication of the Rights of Woman*, perempuan harus dibebaskan dari subordinasi yang membuat mereka bergantung secara ekonomi maupun sosial pada laki-laki.²⁶

Mary Wollstonecraft menyampaikan pemikiran feminisme liberal yang bisa dimiliki menjadi sebuah gerakan sosial dengan maksud menghapus ketidaksetaraan gender dengan menekankan kesetaraan hak yang dimiliki oleh para perempuan serta laki-laki, tidak hanya sebagai bentuk perlawanan terhadap laki-laki. Mary Wollstonecraft menegaskan pentingnya kebebasan perempuan untuk

²⁵ Dr. Iklasih Dalimoenthe, M.Si, 50

²⁶ Ardhia Rachma Cahyani, 3

mewujudkan kemandirian, meningkatkan status sosial, serta memperkuat partisipasi perempuan dalam kehidupan masyarakat.²⁷

Mary Wollstonecraft menyampaikan pemikiran feminisme liberal yang bisa dimiliki menjadi sebuah gerakan sosial dengan maksud menghapus ketidaksetaraan gender dengan menekankan kesetaraan hak yang dimiliki oleh para perempuan serta laki-laki, tidak hanya sebagai bentuk perlawanan terhadap laki-laki. Mary Wollstonecraft menegaskan pentingnya kebebasan perempuan untuk mewujudkan kemandirian, meningkatkan status sosial, serta memperkuat partisipasi perempuan dalam kehidupan masyarakat.²⁸

Prioritas dari feminisme liberal yaitu terhadap kesamaan yang dimiliki oleh para perempuan serta para laki-laki. Feminisme memiliki asumsi dasar yaitu jika keseimbangan dan kebebasan itu sumbernya dari rasionalisme. Pada hakikatnya antara perempuan dan laki-laki itu tidak terdapat perbedaan.²⁹ Maka feminisme memiliki dasar perjuangan yaitu supaya mewujudkan kesetaraan serta hak yang sama untuk semua manusia, terutama fokus terhadap perempuan, dengan

²⁷ Mukhamad Bagus Irawan dkk, *Analisis Feminisme Liberal Terhadap Praktik Lamaran Ganjuran Di Desa Mayong Lamongan, Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 6.1, 2025, 48-55

²⁸ Afian Rokhmansyah, S.S., M, Hum, 50-51

dasar kesamaan mereka yang sama-sama sebagai makhluk sosial di dunia ini.³⁰

Dari sudut pandang filosofis, Mary Wollstonecraft mengatakan bahwa setiap orang memiliki nilai moral yang sama, tidak peduli jenis kelamin, ras, keyakinan, atau agama mereka. Baginya, seseorang hanya seharusnya dibedakan berdasarkan kepribadiannya, kemampuannya, dan kecerdasannya. Oleh karena itu, hak dan kebebasan setiap orang adalah sesuatu yang penting dan harus dijaga, baik untuk perempuan maupun laki-laki. Kebebasan itu sendiri adalah dasar dari kebijaksanaan, karena tanpa memiliki kebebasan, tidak mungkin ada kebijakan yang adil. Kebebasan itu penting dalam pandangan filsafat, karena manusia bisa memperolehnya sebagai cara untuk menemukan kebenaran. Dalam pemahamannya, bisa diartikan bahwa kebebasan harus dijalani dalam lingkungan yang memenuhi etika, di mana setiap orang harus mengatur dan melakukan kebebasan dengan tepat. Jika seorang perempuan tidak memiliki kebebasan, maka dia akan mengalami batasan dalam berpikir dan melakukan hal-hal tertentu, yang pada akhirnya menghalangi perannya dalam masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan dalam struktur sosial yang lebih luas. Jika perempuan diberi kesempatan dan pendidikan yang sama

³⁰ Siti Dana P. R, "*Feminisme Dalam Perkembangan Aliran Pemikiran Dan Hukum Indonesia*," *Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana*, 2012, 100

dengan laki-laki, maka perempuan juga bisa memberikan kontribusi yang sama besar bagi masyarakat seperti yang diberikan laki-laki.³¹

5. Rasionalitas Perempuan

Nilai rasional berangkat dari asumsi dasar yaitu kemampuan berpikir logis dan rasional yang dimiliki perempuan setara dengan laki-laki. Feminisme liberal menolak gagasan biologis yang mengaitkan kemampuan rasionalitas dengan gender. Menurut Simone de Beauvoir dari bukunya *The Second Sex* (1949), menegaskan mengenai perempuan tidak ditentukan sejak lahir dari kondisi inferior, dibentuk oleh konstruksi sosial yang mengekang potensi rasional mereka. Dengan kata lain, perbedaan kapasitas bukan berasal dari kodrat, melainkan dari pendidikan dan pengalaman sosial yang timpang.³²

Feminisme Liberal berangkat dari asumsi jika perempuan serta laki-laki mempunyai kapasitas setara dalam hal rasionalitas dan kemampuan berpikir.³³ Mary Wollstonecraft menegaskan bahwa perempuan juga berhak memiliki kesempatan yang sama untuk berfikir dan hidup mandiri. Ia juga mengatakan bahwa perempuan

³¹ Irda Tri Fauziah dan dkk, 6-7

³² Yohana Damiana Uto Riangtobi, Wensensiana Yasinta Andim, Yeyen Subandi, *Perempuan Dalam Budaya Patrilineal di Nusa Tenggara Timur Menurut Teori The Second Sex Simone de Beauvoir*, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 3 No. 7, 2025, 468

³³ Iwanuz Zurur, Nafisah Innayati and Fahmi Fahreza Al-muzakki, "Gerakan Feminisme Dalam Pandangan Agama-Agama," *Halaqah: Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1 (1), 2024, 137

adalah orang yang berhati lembut, dan perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat diakibatkan oleh pendidikan yang mereka terima. Mengapa masyarakat selalu menganggap laki-laki itu rasional dan perempuan itu sentimental, cuma karena pengaruh yang mereka terima sejak kecil. Laki-laki diajarkan untuk selalu berpikir logis, sementara perempuan diberi pendidikan yang memperkuat sifat feminin dan perasaan mereka, sehingga nilai-nilai itu terasa seperti mewakili perempuan secara tetap. Karena hal itu, muncul peran gender dan tradisi yang sebenarnya adalah hasil buatan dari pendidikan yang diajarkan oleh masyarakat. Karakter yang tampak maskulin atau feminin merupakan hasil dari cara produk tersebut dibuat.³⁴

Dengan memperjuangkan pengakuan bahwa perempuan adalah individu yang rasional dan memiliki hak yang sama. Mary Wollstonecraft mendorong pergeseran paradigma menuju konsep keadilan yang lebih substantif dan inklusif. Pemikiran Mary Wollstonecraft, melalui karyanya *A Vindication of the Rights of Woman* (1792) menjadi referensi penting dalam wacana feminisme rasional yang menegaskan kapasitas rasional perempuan setara dengan laki-laki dan hak atas pendidikan yang setara sebagai basis emansipasi. Sejalan dengan garis besar tentang pendapat Mary Wollstonecraft, tentang

³⁴ Ilaa Thurfah Dhiyaa, 213

studi-studi kontemporer yang menyoroti pentingnya pengajaran berbasis rasionalitas, literasi kritis, dan pembentukan identitas kewargaan perempuan sebagai kunci pemberdayaan dalam konteks budaya. Melalui perubahan ini dalam pembagian kerja restrukturisasi institusi sosial seperti dunia kerja keluarga pendidikan, dan kesetaraan gender dapat diwujudkan. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan akses dan peluang yang setara kepada perempuan agar mereka dapat mengembangkan potensi diri serta memperoleh kebebasan dalam menentukan pilihan hidup.³⁵

Berdasarkan penjelasan ini, maka feminisme liberal memperjuangkan kesetaraan hak, pendidikan, kebebasan, dan rasionalitas perempuan agar setara dengan laki-laki. Dalam perjuangan ini untuk menghapus diskriminasi dan ketidakadilan dalam semua aspek untuk mencapai suatu kesetaraan dalam berbagai kehidupan.

B. Feminisme Dan Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sosiologi

1. Feminisme Dalam Perspektif Sosiologi

Feminisme adalah sebuah gerakan yang berusaha melindungi hak-hak perempuan, mencari tahu akar dari ketimpangan yang membuat perempuan tertindas, serta berjuang untuk melepaskan perempuan dari pengaruh budaya patriarki. Feminisme muncul dari

³⁵ Nur Sofiyah Gunawan, *PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SKRIPSI Oleh : Nur Sofiyah Gunawan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam Surabaya*, 2021, 54

kesadaran perempuan tentang diskriminasi, ketidakadilan, dan posisi yang kurang dihargai yang dialami oleh perempuan, serta upaya untuk mengubah cara masyarakat memperlakukan laki-laki dan perempuan secara adil. Feminisme ini sering dianggap muncul di Barat karena adanya penindasan terhadap perempuan, seperti tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, kesulitan secara ekonomi, dan masalah lainnya. Gerakan feminisme yang membahas tentang kesetaraan hak pertama kali berkembang dengan cepat di tengah masyarakat perempuan di dunia Barat pada masa abad kedelapan belas. Penindasan terhadap wanita pada masa itu mengakibatkan penderitaan yang sangat mendalam bagi para korban. Oleh karena itu, muncul gerakan feminisme yang menuntut kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki, menghilangkan stigma bahwa perempuan lemah dan tidak berdaya, serta melindungi perempuan dari tindakan kejahatan terhadap mereka. Munculnya teori sosiologis feminisme yaitu dari sosiologi pengetahuan. Feminisme ini dasarnya adalah ingin untuk menganalisis, menjabarkan, serta mengubah dunia melalui perspektif perempuan. Perempuan dianggap bekerja dari segi subordinat pada relasi sosialnya, Mereka melihat produksi pengetahuan adalah bagian dari sistem kekuasaan yang mengatur semua produksi di dalam masyarakat. Perspektif yang terbentuk ini merupakan sebuah produk massal pada kehidupan sosial yang mempunyai sejarah yang mumpuni

serta kesamaan kondisi sehingga bisa mewujudkan pengetahuan kolektif mengenai relasi sosial.

Feminisme memiliki pondasi dari berbagai hal yang diwariskan Marx. Beliau sudah mengidentifikasi terhadap tiga jenis kolektivitas yang paling utama yaitu pemilik, pekerja, serta perempuan yang kaitanya terhadap tahap reproduksi dan produksi sosial sehingga menjadikan sebagai kelompok perspektif. Perempuan dilihat dari segi historis hidup di bawah sistem patriarki, apapun ras dan kelas dari perempuan tersebut mereka wajib melaksanakan tugas reproduksi sosial diantaranya pelayanan emosional, seksual, merawat yang sakit dan anak-anak, menata rumah, menyiapkan makanan, mengasuh anak serta melahirkan anak. Namun solidaritas perempuan sebagai “ kelas” di dalam produksi patriarki dihancurkan oleh konfigurasi kelas lain, termasuk kelas ekonomi dan kelas ras.³⁶

Istilah sosiologi feminis adalah istilah yang muncul dalam bidang sosiologi dan kemudian berkembang menjadi bagian dari pengaruh feminisme ke dalam berbagai ilmu sosial dan humaniora. Dalam pandangan sosiologi feminis, beberapa hal seperti kebiasaan masyarakat, struktur sosial, dan penggunaan bahasa berperan dalam membentuk makna dan konstruksi sosial yang menyebabkan

³⁶ George Ritzer Douglas J. *Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik sampai perkembangan mutakhir Teori Sosial Postmodern*, (kreasi wacana perum sidoreji bumi indah, 2014), 523

pemiskinan, pelayanan, serta memposisikan perempuan sebagai objek yang diperlakukan. Menurut Rosenberg dan Howard (2008), pendekatan sosiologi feminis selain bersifat lintas disiplin juga bersifat interseksional. Pendekatan ini tidak hanya melibatkan konstruksi gender, tetapi juga menggali interaksi dan dinamika yang terjadi antara gerakan feminisme dengan isu sosial, serta kekuasaan yang dianggap merugikan perempuan. Perspektif feminis adalah cara melihat bahwa ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan adalah bentuk ketimpangan sosial yang ada di masyarakat, dan menunjukkan struktur dominasi yang saling mengontrol antara keduanya. Berdasarkan menurut para ahli tentang sosiologi feminis bagaimana struktur sosial yang tidak bersifat netral, yang dipengaruhi oleh berbagai kekuasaan yang menempatkan perempuan pada posisi subordinasi. Karena itu, sosiologi feminis tidak hanya menganalisis ketidakadilan tersebut, tetapi juga mendorong perubahan menuju masyarakat yang menjunjung keadilan dan kesetaraan bagi perempuan.³⁷

Menurut Ritzer dan Gordon (2010) mengenai teori feminisme untuk mengusulkan sejumlah 6 enam utama yang menjadi pondasi teori diantaranya *pertama*, dasar dari sosiologi wajib dari sosiologi pengetahuan yang memiliki pemikiran jika parsialitas pada seluruh

³⁷ Hanifa Maulidia, "Perempuan dalam Kajian Sosiologi Gender," *Polikrasi: journal of Politics and Democracy*, 1 (1), 2021, 57

pengetahuan yang mengetahui pihak di dalamnya serta diposisikan dari segi sosial. *Kedua*, dasar dari struktur sosial makro yaitu terhadap kelompok pihak yang paling diperdaya sesuai kepentingannya dan dilakukan oleh berbagai pihak subordinat yaitu mereka yang memiliki posisi lebih rendah. *Ketiga*, tahap mikro interaksional pada masyarakat merupakan keputusan tatanan yang paling dominan pada subordinat. *Keempat*, pada subjektivitas perempuan, seluruh situasi itu membuat terpecahnya kesadaran yang seiring terhadap kegagalan karena ideologi patriarki yang ditopang pengalaman perempuan untuk akulturasi kehidupannya. *Kelima*, yang dilihat diberlakukan untuk perempuan serta untuk seluruh orang yang tersubordinasi walau mereka pada wilayah yang tidak sama. *Keenam*, wajib bagi setiap orang untuk mempertanyakan penggunaan kategori yang dikembangkan melalui disiplin dan laki-laki mendominasinya.³⁸

Teori sosiologi feminis menurut Demartoto (2012) teori ini mendorong sosiologi dalam memusatkan perhatian pada hubungan gender dan kehidupan perempuan menggunakan pendekatan diantaranya adalah teori konflik, fungsionalis sosial makro serta interaksionisme simbolik maupun etnometodologi (dua sosial makro). Hal ini dilakukan melalui penelitian tentang bagaimana penciptaan

³⁸ Hanifa Maulidia, "Perempuan dalam Kajian Sosiologi Gender," *Polikrasi: journal of Politics and Democracy*, 1 (1), 2021, 57

perbedaan gender serta penciptaan ulang pada relasi antar individu. Perspektif dari teori perbedaan gender yaitu melihat kondisi dari wanita memiliki perbedaan dengan laki-laki, teori ini juga menerangkan perbedaan tersebut melalui perspektif perempuan maupun laki-laki, atau dari interaksi sosial dan peran institusional, serta konstruksi ontologis perempuan sebagai orang lain.³⁹

Sosiologi feminis yang dipaparkan oleh pemikiran Dorothy E Smith (1987), untuk mengkritik terhadap ilmu yang ditengarai memiliki bentuk seksis, yakni sesuatu oleh feminisme yang dianggap sebagai pengetahuan yang menggambarkan segala hal dari sudut pandang laki-laki. Ilmu yang seksis menempatkan perempuan sebagai unsur pengetahuan yang tidak penting. Konsekuensi lanjutan dari hal tersebut adalah otoritas keilmuan secara tidak langsung mengacu pada karya laki-laki.⁴⁰

Berdasarkan penjelasan ini, feminisme merupakan perjuangan untuk hak-hak perempuan. Menurut beberapa para ahli bahwa ketidakadilan disebabkan oleh struktur patriarki dan struktur sosial yang menyebabkan posisi laki-laki lebih dominan dari pada perempuan. Oleh karena itu feminisme hadir untuk mengubah masyarakat bersikap

³⁹ Argyo Demartoto, " *Teori Sosiologis Feminis*, (1), 2012, 1

⁴⁰ Widjajanti M. Santoso, *Soiologi Feminisme Kontruksi Perempuan Dalam Industri Media* (LKIS Yogyakarta 2011), 8

adil terhadap pria dan wanita agar mendapatkan hak serta kesempatan yang sama di tengah-tengah realitas sosial.

2. Kesenjangan Gender Dalam Perspektif Sosiologi

Gender adalah atribut sosial yang membedakan laki-laki dan perempuan, yang terbentuk melalui konstruksi sosial dalam masyarakat. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran, sikap, tugas, hak, serta fungsi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Gender adalah dasar yang menentukan perbedaan kontribusi antara laki-laki dan perempuan dalam kebudayaan kolektif, yang merujuk pada perbedaan dalam hubungan sosial antara anak laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, kesetaraan gender adalah istilah yang sering digunakan dalam studi gender untuk menunjukkan pembagian tugas dan hak yang seimbang serta adil. Kesenjangan gender adalah kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama, seimbang, dan setara dalam memperoleh hak-haknya sebagai manusia di segala aspek kehidupan. Kesenjangan gender adalah konsep yang membuat stereotip tidak lagi membatasi peran laki-laki dan perempuan dalam mengembangkan potensi masing-masing.⁴¹

⁴¹ Dhea Januastasya Audina, *Kesenjangan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 4, 2022, 151

Ketidakadilan gender merupakan salah satu persoalan yang masih terjadi dalam berbagai kehidupan. Dalam kehidupan perempuan kerap menghadapi diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, politik, pendidikan, serta pemenuhan hak-hak dasar.⁴² Menurut Fakih (2012), adanya kondisi perbedaan jenis kelamin sebenarnya sama sekali tidak sampai menimbulkan permasalahan selama tidak memunculkan *gender inequalities* atau gender. Berbagai bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang pertama, marginalisasi yaitu merupakan wujud menjadikan miskin salah satu jenis kelamin dan pada konteks ini adalah perempuan yang diakibatkan dari gender.⁴³ Bentuk diskriminasi tersebut tercermin dalam ketidakadilan struktural yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat, mengalami marginalisasi dalam dunia kerja, memikul beban ganda dalam ranah domestik dan publik, serta menghadapi pelabelan negatif atau stereotip, hingga kekerasan berbasis gender. Meskipun kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender semakin meningkat, faktanya fenomena ini menunjukkan perempuan masih terus mendapat tantangan dan rintangan yang menghambat dalam berpartisipasi serta berperan secara setara dengan laki-laki. Dengan demikian, ketidakadilan gender bisa dipahami sebagai kondisi adanya tindakan yang tidak adil yang

⁴² Yulia Tri Wahyuni and Dwi Putri Lestarka, "Analisis Ketidakadilan Gender Dan Peran Hukum Sebagai Payung Perlindungan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Ranah Pendidikan," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2 (1), 2024, 538-539

⁴³ Alfian Rokhmansyah, S.S., M, Hum, 19

diterima antara perempuan serta laki-laki, yang mencakup ketimpangan dalam aspek hak, kesempatan, perlindungan, dan kewajiban di berbagai dimensi kehidupan.⁴⁴ Menurut Moses (1996) dan Irohmi (1990), Mereka menegaskan perlakuan tidak adil yang dialami oleh perempuan merupakan adanya sistem patriarki dan didukung untuk menguasai perempuan.

Dari sudut pandang sosiologi, dilihat dari aspek masyarakat, hukum, kelembagaan sosial, dan pranata sosial, dapat diketahui bahwa dalam isu kesetaraan gender memang terdapat dominasi, yakni laki-laki lebih kuat dibandingkan perempuan. Adanya kesetaraan gender dalam masyarakat mengasumsikan bahwa masyarakat harus memiliki kesetaraan atau persamaan hak, keadilan, dan kepastian hukum agar semua orang dapat menikmati bersama hasil dari pembangunan yang ada. Selain itu, setiap orang harus dapat berpartisipasi dalam pembangunan tanpa mengalami tekanan atau intimidasi. Peran dan tanggung jawab yang disadari dengan baik dapat membuat penyelesaian masalah berjalan lancar. Namun, ketidaksetaraan gender bisa terjadi jika laki-laki terlalu mendominasi dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini juga disebabkan oleh adanya budaya patriarki yang menganggap laki-laki lebih mampu dan perempuan memiliki

⁴⁴ Agus Afandi, "Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender," *Lentera : Journal of Gender and Children Studies*, 1 (1), 2019, 4

keterbatasan. Oleh karena itu, kesetaraan gender terkadang masih dianggap lebih dominan oleh pihak laki-laki. Kendala dalam mewujudkan kesetaraan gender meliputi akses pendidikan yang masih terbatas, adanya pernikahan dini pada usia muda, hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang dianggap masih ringan, serta partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang politik dan pemerintahan yang masih terbatas.⁴⁵

Pendekatan sosiologi memberikan cara berpikir kritis untuk memahami hubungan antara struktur sosial dan ajaran agama, serta melihat bagaimana hierarki gender dibuat dan didukung oleh lembaga-lembaga agama. Perspektif ini menekankan bahwa ketidakadilan gender tidak hanya datang dari ajaran agama itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya yang membentuk cara orang memahami dan menerjemahkan ajaran tersebut.⁴⁶

Berdasarkan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa, Gender adalah perbedaan tugas dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh masyarakat, Kesetaraan gender berarti laki-laki dan perempuan memiliki hak, kesempatan, dan kedudukan

⁴⁵ Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, Panti Rahayu, Fransiska Novita Eleanor, *Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis*, *Sasi (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura)*, Vol. 26, No. 2, 2020, 159-161

⁴⁶ Noverin Andrea Anang, Yanto Sandy Tjang and Herkulana Mekarryani Soeryamassoka, *"Kesetaraan Gender dalam Perspektif Agama di Indonesia," Jurnal Pendidikan Agama Kristen dan Katolik*, . 2,4, (November), 2025, 186

yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, dalam kenyataannya mereka masih sering mengalami ketidakadilan, seperti diskriminasi, subordinasi, stereotip, dan marginalisasi akibat budaya patriarki. Dalam perspektif sosiologi, ketidakadilan tersebut dipandang sebagai hasil dari konstruksi sosial dan relasi kekuasaan.

3. Kesenjangan Pendidikan Dalam Perspektif Sosiologi

Pendidikan dalam sosiologi adalah salah satu fondasi penting dalam membentuk kepribadian seorang manusia sekaligus mendorong dan membangun masyarakat. Melalui kajian, sosiologi pendidikan menyoroti relasi antara lembaga pendidikan, masyarakat, serta dinamika sosial, yang terus berkembang. Berbagai tokoh dan aliran pemikiran dalam sosiologi pendidikan memberikan kontribusi penting untuk memahami bagaimana pendidikan bekerja dalam kerangka struktur sosial, budaya, ekonomi, dan politik, sekaligus bagaimana struktur tersebut mempengaruhi praktik pendidikan. Salah satu isu yang semakin memperoleh perhatian adalah kesetaraan gender. Kesenjangan gender tidak hanya dimaknai sebagai pemberian kesempatan memperoleh pendidikan yang setara bagi pria dan wanita, tetapi juga bagaimana pendidikan berkontribusi sebagai instrumen untuk mengurangi diskriminasi, ketimpangan, dan ketidakadilan berbasis gender. Dalam perspektif kritis, pendidikan perlu diposisikan sebagai ruang pembebasan yang mendorong kesadaran kritis peserta

didik terhadap relasi kuasa yang timpang, termasuk ketidakadilan gender.⁴⁷

Perspektif sosiologi kritis memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana pendidikan berfungsi sebagai arena hegemonik dimana norma-norma sosial tertentu dipertahankan oleh kelompok dominan. Konsep reproduksi sosial yang dikemukakan oleh Bourdieu dan hegemoni Gramsci menjelaskan bagaimana ketidaksetaraan dalam pendidikan direproduksi secara sistematis. Teori sosiologi kritis menekankan pentingnya analisis terhadap struktur sosial yang ada bagaimana norma-norma tersebut dapat direproduksi melalui pendidikan. Dengan memahami bahwa pendidikan bukan hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga arena dimana nilai-nilai dan norma-norma sosial dibentuk, melalui rancangan sistem pendidikan yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Menurut Rahayu, et al (2019) menunjukkan bahwa pendekatan kritis dalam pendidikan dapat membantu dan mengembangkan kesadaran kritis terhadap ketidakadilan sosial, termasuk ketidaksetaraan gender, dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam perubahan sosial. Secara keseluruhan teori-teori sosiologi kritis seperti teori reproduksi sosial Bourdieu dan konsep

⁴⁷ Lailatul Mufarrokhah, Binti Maunah, *Analisis Tokoh dan Aliran Sosiologi Pendidikan dalam Perspektif Kesetaraan Gender, Jurnal Abdi Pendidikan* Vol 06 .No. 02, 2025, 44

hegemoni Gramsci dalam analisis kesetaraan gender di pendidikan membuka peluang untuk merumuskan strategi reformasi yang lebih menyeluruh. Penguatan pelatihan guru berbasis gender dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi perempuan. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, sekolah dan masyarakat diharapkan dapat mengatasi kelakuan norma sosial yang telah mengakar, dan pada akhirnya menjadikan pendidikan sebagai instrumen emansipasi yang mampu mereproduksi ketidaksetaraan gender dalam masyarakat.⁴⁸

Dari sudut pandang sosiologi, pendidikan selalu memperhatikan struktur sosial dan tidak bisa dianggap netral. Menurut teori konflik, sistem pendidikan seringkali berperan sebagai alat yang memperkuat ketimpangan sosial dan perbedaan gender. Patriarki yang terbentuk dalam struktur sosial menciptakan "kesadaran palsu" di mana perempuan menerima posisi yang di bawah sebagai pelengkap, dan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang biasa. Akibatnya, dominasi pria dalam dunia pendidikan tidak hanya terlihat saat mengambil keputusan dan membuat kebijakan, tetapi juga dalam simbol-simbol dan cerita-cerita yang diajarkan di dalam kelas. Teori fungsionalisme memandang pendidikan sebagai lembaga sosial yang bertugas mempertahankan kestabilan dan kohesi masyarakat. Menurut

⁴⁸ Fritz Hotman et al., *Sosiologi Kritis dan Transformasi Pendidikan : Menggugat Ketidaksetaraan Gender di Indonesia*, 14 (2), 2025, 9-12

Durkheim dan Parsons, setiap bagian dari masyarakat memiliki peran yang membantu menjaga ketertiban sosial. Namun dalam hal gender, pendekatan ini biasanya melihat pembagian tugas antara pria dan wanita sebagai hal yang biasa dan berfungsi. Misalnya, peran wanita sebagai pembantu rumah tangga dianggap penting untuk menjaga keberlanjutan keluarga, sedangkan laki-laki sebagai penghasil uang dianggap sangat penting bagi kelangsungan ekonomi rumah tangga. Pandangan ini, meski terlihat netral, justru memperkuat sistem patriarki karena membenarkan ketidakseimbangan peran dalam bidang pendidikan dan pekerjaan.

Berbeda dengan teori fungsionalisme, teori konflik Marx, Bourdieu menganggap pendidikan sebagai tempat bertarungnya ideologi dan kekuasaan. Bourdieu (1986) menjelaskan gagasan tentang modal budaya dan kebiasaan (*habitus*) untuk menunjukkan bagaimana sekolah memperkuat ketimpangan sosial dengan menerapkan nilai-nilai yang dianggap sopan dan berkelas. Dalam hal gender, kebiasaan patriarki membuat norma dan tindakan laki-laki lebih dihargai di ruang umum dibandingkan perempuan. Akibatnya, wanita menghadapi hambatan struktural yang membuat sulit bagi mereka untuk mencapai posisi akademis atau peran kepemimpinan. Teori konflik menunjukkan bahwa ketimpangan gender bukanlah sebuah kecelakaan sosial,

melainkan hasil dari hubungan kekuasaan yang terus dijaga oleh sistem sosial melalui lembaga pendidikan.

Pendekatan interaksionisme simbolik memperhatikan interaksi sehari-hari yang terjadi dalam lingkungan pendidikan. Dalam konteks ini, identitas gender tidak dianggap sebagai something yang sudah ada sejak lahir, melainkan sesuatu yang diciptakan melalui simbol, bahasa, dan cara berperilaku. Guru memainkan peran penting dalam membentuk identitas gender siswa. Menurut Wani, et al (2024), guru sering kali diminta menjadi pemimpin kelompok tanpa dasar yang jelas, sementara perempuan lebih sering diberi tugas-tugas administratif atau yang bersifat estetik. Interaksi ini memperkuat anggapan bahwa kepemimpinan cenderung dipegang oleh laki-laki.⁴⁹

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pendidikan tidak hanya memberikan ilmu, tetapi juga mempengaruhi cara masyarakat memandang peran laki-laki dan perempuan. Dari sudut pandang sosiologi, ketidaksetaraan gender dalam pendidikan terjadi karena masih banyaknya budaya patriarki, ketimpangan dalam kekuasaan, serta nilai dan norma yang membatasi peran feminis. Dengan demikian, pendidikan diharapkan memberi kesempatan setara

⁴⁹ Marlon Garcia Jusufveto and Nur Khasanah, "MEMBANGUN PENDIDIKAN HUMANIS YANG INKLUSIF TERHADAP PEREMPUAN : PERSPEKTIF SOSIOLOGI," *JURNAL STUDI ISLAM, SOSIAL DAN PENDIDIKAN*, 4, 2025, 26

kepada keduanya, menghilangkan perbedaan perlakuan, serta menanamkan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan antara gender.